

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024**

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi
Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.agroklimat@pertanian.go.id

Nomor : B-76 /KU.040/H.10.4/05/2025
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
AUDITED TA 2024

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor
di
Jl. Ir. H. Juanda No.64, Bogor

Sesuai dengan Surat Kepala KPPN Nomor S-451/KPN.2304/2025 tanggal 25 Maret dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan koreksi data/transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga AUDITED Tahun 2024. Atas penyampaian ini, kami menyatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bogor, 5 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran


Rima Purnamayani, S.P., M.Si
NIP.197606132003122001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah salah satu entitas di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2024

Kepala,



Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP.197606132003122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.5. Belanja Bantuan Sosial

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.1.7. Penyisihan Piutang tidak Tertagih

C.1.8. Beban dibayar di Muka

C.1.9. Pendapatan yang masih harus diterima

C.1.10. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
- C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Uang Muka dari KPPN
 - C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.3. Utang yang Belum Ditagihkan
 - C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka
 - C.5.5. Beban yang Masih Harus Dibayar
- C.6. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk diserahkan ke Masyarakat
 - D.8. Beban Bantuan Sosial
 - D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.10. Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih
 - D.11. Kegiatan Non Operasional
 - D.12. Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.3. Selisih Revaluasi Aset
 - E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
 - E.4.5. Koreksi Lain-lain
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN**

***Jl. Tentara Pelajar No 1A Cimanggu, Kota Bogor
TELEPON 0251 8312760, FAXIMILE 02518323909***

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2024

Kepala,



Rima Purnamayani, SP., M.Si

NIP. 197606132003122001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.77.186.700 atau mencapai 297 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 26.000.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.6.680.173.398 atau mencapai 89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.245.158.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.9.850.646.128 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.109.938.325 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp.9.729.356.993 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.11.350.810

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.9.850.646.128

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.33.821.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 7.105.750.623 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.-7.071.929.623 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.156.590.700 dan sebesar Rp.-6.918.341.580 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.-6.918.341.580

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp10,166,001,010 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-6.918.341.580 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6,602,986,698 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 9.850.646.128

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31Desember 2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	-	-		-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2	26,000,000	77,186,700	296	77,558,776
Jumlah Pendapatan		26,000,000	77,186,700	296	77,558,776
BELANJA	B.3				
Belanja Pegawai	B.4	2,743,669,000	2,614,597.426	95	2,475,946,120
Belanja Barang	B.5	4,381,489,000	3,947,975,972	90	3,894,036,493
Belanja Modal	B.6	120,000,000	117,600,000	98	-
Jumlah Belanja		7,245,158,000	6,680,173,398	89	6,369,982,613

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN NERACA

PER 31Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	109.335.000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2	(546.675)	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3	108.973.325	0
Persediaan	C.1.4	965.000	1.505.000
Jumlah Aset Lancar		109.938.325	1.505.000
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	18.133,880,752	18.143.458.252
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	10.588.957.500	10.588.957.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	152.320.500	152.320.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	348.902.500	348.902.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-19.494.704.259	-19.083.686.933
Jumlah Aset Tetap		9.729.356.993	10.149.951.819
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	129.675.000	129.675.000
Aset Lain-lain	C.3.2.	507.801.673	2.294.747.749
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-626.125.863	-2.409.182.664
Jumlah Aset Lainnya		11.350.810	14.544.191
Jumlah Aset		9.850.646.128	10.166.001.010
EKUITAS			
Ekuitas	C.5.1	9.850.646.128	10.166.001.010
Jumlah Ekuitas		9.850.646.128	10.166.001.010
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		9.850.646.128	10.166.001.010

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31Desember 2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	33,821,000	17,021,000
JUMLAH PENDAPATAN		33,821,000	17.021.000
Beban Pegawai	D.2.	2.618.487.426	2.475.946.120
Beban Persediaan	D.3.	42,022.700	141.915.900
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,255,420,262	2.376.320.529
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,224,270,714	683.028.231
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	426,802,296	691.266.833
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	538.385.550	767.175.758
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.9.	546.675	0
JUMLAH BEBAN		7.105.750.623	7.118.632.371
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.071.929.623)	(7.118.632.371)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	- 3,002,657	-55.357.776
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	156.590.700	5,180,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	156.590.700	5,180,000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6.918.341.580)	(7.058.094.595)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(6.918.341580)	(7.058.094.595)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1.	10,166,001,010	10.844.163.400
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6,918.341.580	-7,058,094,595
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	87,508,368
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	6,602,986,698	6,292,423,837
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-315.354.882	-678,162,390
EKUITAS AKHIR	E.6.	9.850.646.128	10,166,001,010

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan/Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Entitas berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No 1A Cimanggu Bogor.

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengalami perubahan nama menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian :

Tugas : Melaksanakan Pengujian Standar Instrument Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengujian standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
- c. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi.
- d. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar.
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 Basis Akuntansi Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LR

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

- Aset Lancar**
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan	0,5%
Kurang Lancar	S.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

<i>Aset Tetap</i>	b. Aset Tetap • Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar • Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. • Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. • Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
<i>Penyusutan Aset Tetap</i>	c. Penyusutan Aset Tetap • Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. • Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan • Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. • Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. • Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7,245,158,000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	26.000.000	26.000.000
Jumlah Pendapatan	26.000.000	26.000.000
Belanja	7.688.631.000	7.245.158.000
Belanja Pegawai	3.003.669.000	2.743.669.000
Belanja Barang	4.384.962.000	4.381.489.000
Belanja Modal	300.000.000	120.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	7.688.631.000	7.245.158.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp77.186.700

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.77,186,700 atau mencapai 297 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp26.000.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari Pendapatan dari Sewa alat instrumen lapang, Mess dan Pelepasan aset non lancardengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penggunaan sarana dan Prasarana	6.500.000	29,000,000	446
Pendapatan Lain-lain	19.500.000	48.186.700	247
Jumlah	26.000.000	77.186.700	297

Realisasi Pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dari tamu mess sebesar Rp. Pengembalian belanja pegawai TAYL sebesar Rp. pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Penggunaan sarana dan Prasarana	29.000.000	7.950.000	72,59
Pendapatan Lain-lain	48.186.700	69.608.776	44,46
Jumlah	77.186.700	77.558.776	0,48

Realisasi
Belanja Rp
6.680.173.398

B.2 Belanja
Realisasi Belanja Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada TA 2024Anggaran belanja sebesar Rp.6.680.173.398 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.743.669.000	2.624.123.602	95
Belanja Barang	4.381.489,000	3.949.471.672	90
Belanja Modal	120.000.000	117.600.000	98
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	7.245.158.000	6.691.195.274	92,35
Pengembalian Belanja Pegawai	0	9.526.176	0
Pengembalian Belanja Barang	0	1.495.700	0
Total	7.245.158.000	11.021.876	0,15
Jumlah	7.245.158.000	6.680.173.398	92,20

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,80 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kegiatan sepenuhnya sudah terlaksana secara maksimal
2. Belanja modal sudah terealisasi secara maksimal

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	2.624.123.602	2.475.946.120	5,65
Belanja Barang	3.949.471.672	3.894.036.493	1,40
Belanja Modal	117.600.000	0	100
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	6.691.195.274	6.369.982.613	4,80

Belanja
Pegawai Rp
2.614.597,426

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.614.597.426 dan Rp. 2.475.946.120 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,30 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan 2 orang pegawai P3K.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.552.325.602	2.439.635.733	4,42
Belanja Lembur	71.798.000	36.672.000	48,92
Jumlah Belanja Kotor	2.624.123.602	2.476.307.733	5,63
Pengembalian Belanja Pegawai	9.526.176	361.613	96,20
Jumlah Belanja	2.614.597.426	2.475.946.120	5,30

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang Rp
3.947.975.972

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.947.975.972 dan Rp. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,37 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.
2. Peningkatan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk memperbaiki fasilitas kantor.
3. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.669.506.347	1.669.462.200	0,00
Belanja Barang Non Operasional	114.982.100	255.778.640	122,45
Belanja Persediaan	41.482.700	143.420.900	-245,74
Belanja Jasa	470.931.815	451.079.689	4,22
Belanja Pemeliharaan	1.224.270.714	683.028.231	44,21
Belanja Perjalanan Dinas	428.297.996	692.196.833	61,62
Jumlah Belanja Kotor	3.949.471.672	3.894.966.493	1,38
Pengembalian Belanja Barang	1.495.700	930.000	37,82
Jumlah Belanja	3.947.975.972	3.894.036.493	1,37

B.5 Belanja Modal

Belanja
Modal Rp
117.600.000

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.117.600.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.600.000	0	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	117.600.000	0	100
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	117.600.000	0	100

Belanja
Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Karena tidak ada anggaran belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin Rp
117.600.000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp. 117.600.000 sebesar Rp.0. Pada TA 2024 mengalami kenaikan 100 persen karena adanya pagu belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.600.000	0	100
Jumlah Belanja Kotor	117.600.000	0	100
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	117.600.000	0	100

Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Renovasi Gedung Kantor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September20 24	Realisasi 30 September20 23	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan Rp0

Belanja
Bantuan
Sosial Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp
109.714.025

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.109.714.025 dan Rp. 1.505.000. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BNI No. Rek.9890596486941000	0	0
Uang Muka di PUM	0	0
Jumlah	0	0

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp108.973.325 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	108.973.325	0
Jumlah	108.973.325	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang lainnya sebesar Rp.108.973.325 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional sebagai akibat dari perpindahan jabatan dari fungsional

(peneliti/teknisi litkayasa/perekayasa) menjadi fungsional lain sebanyak 7 orang berkas terlampir.

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bukan

Pajak

Rp.108.973.325

Bagian Lancar

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan

Ganti Rugi

(TP/TGR)

NIHIL

Tabel
Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	NIHIL		
	Jumlah	0	0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	NIHIL		
	Jumlah	0	0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
NIHIL

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Jk.
Pendek NIHIL

Tabel
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	3.890.000	585.975	3.304.025
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	3.890.000	585.975	3.304.025
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	3.890.000	585.975	3.304.025

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
NIHIL		
Jumlah	0	0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut

*Beban Dibayar
di Muka*
NIHIL

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima*
NIHIL

Tabel
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
NIHIL		
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp.965.000

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.965.000 dan Rp1.505.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	965.000	1.505.000
Barang untuk Pemerliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	965.000	1.505.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp9.729.356.99
3

Saldo Aset Tetap Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 9.729.356.993 dan Rp.10.149.951.819. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp0

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tidak memiliki tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
MesinRp
18.133.880.752

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp18.133.880.752 dan Rp. 18.143.458.252 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2024	18.143.458.252
Mutasi tambah:	
Pembelian	117.600.000
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 31 Desember 2024	18.261.058.252
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	17.499.117.353
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	761.940.899

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp
10.588.957.500

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.588.957.500 dan. Rp10.588.957.500 Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2024	10.588.957.500
Mutasi tambah:	0
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo Per 31 Desember 2024	10.588.957.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	1.958.478.767
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	8.630.478.733

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp152.320.500

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp152.320.500 dan Rp152.320.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2024	152.320.500
Mutasi tambah:	0
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2024	152.320.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	37.108.139
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	115.212.361

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp348.902.500

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp348.902.500 dan Rp348.902.500 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2024	348.902.500
Mutasi tambah:	0
-	-
Mutasi Kurang:	0
-	-
Saldo Per 31 Desember 2024	348.902.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	118.022.517
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	230.879.983

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
NIHIL

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp-
19.494.704.259

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-19.494.704.259 dan Rp.-19.083.686.933 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18.133.880.752	17.499.117.353	634.763.399
2.	Gedung dan Bangunan	10.588.957.500	1.958.478.767	8.630.478.733
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.320.500	37.108.139	115.212.361
4.	Aset Tetap Lainnya	348.902.500	0	348.902.500
	Jumlah	29.106.461.252	19.494.704.259	9.729.356.993

Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tanggal adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-546.675
Piutang Jangka
Panjang Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp- 546.675 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp11.350.810

Saldo Aset Lainnya Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing adalah sebesar Rp11.350.810 dan Rp14.544.191. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp129.675.000

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing adalah sebesar Rp129.675.000 dan Rp129.675.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berupa Hak Cipta, Paten dan *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2024	129.675.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2024	129.675.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	118.324.190
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	11.350.810

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain
Rp507.801.673

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.507.801.673 dan Rp. 2.294.747.749. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2024	2.294.747.749
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang:	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2024	2.294.747.749
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	507.801.673
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.786.946.076

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp-
626.125.863

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-626.030.501 dan Rp.-2.409.878.558 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian AkumulasiAmortisasianPenyusutanAsetLainnya TA
2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	13.350.000	1.999.190	11.350.810
2	Paten	825.000	825.000	0
3	Software	115.500.000	115.500.000	0
	Jumlah	129.675.000	118.324.190	11.350.810
B.	Aset Lain-lain	507.801.673	507.801.673	0
	Jumlah	507.801.673	507.801.673	0
	Total	637.476.673	626.125.863	11.350.810

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp0

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.Kewajiban Jangka Pendek Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0

Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp.0 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	NIHIL	

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada *Treasury Notional Pooling (TNP)* dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan.Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

C.5.3. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp0

Utang yang belum ditagihkan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Utang yang belum ditagihkan disebabkan karena adanya BAST/SPBy yang sampai dengan periode pelaporan belum dilakukan transaksi lanjutannya.

Tabel
Rincian Utang yang Belum DitagihkanTA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	NIHIL	
Total		

C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di
Muka Rp0

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut

5.5. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

C.6 Ekuitas

Ekuitas
Rp
9.850.646.128

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.850.646.128 dan Rp10.166.001.010. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan
PNBP
Rp.77.186.700

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.77.186.700 dan Rp. 77.558.776 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	4.821.000	4.821.000	0
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana	29.000.000	7.950.000	72,59
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN	0	55.357.776	0
Pendapatan lainnya	43.365.700	9.430.000	78,25
Jumlah	77.186.700	77.558.776	0,48

Pendapatan berasal dari Pendapatan sewa gedung/ bangunan , penjualan hasil pelepasan aset, sewa alat instrumen lapang dan sewa mess. Pendapatan Lain-Lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai yang berasal dari transaksi tahun sebelumnya.

Beban
Pegawai Rp
2.614.597.426

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir per Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.614.597.426 dan Rp. 2.475.946.120 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji	1.738.379.200	1.697.330.320	2,36
Beban Tunjangan-tunjangan	562.337.226	500.169.800	11,06
Beban Uang Makan	242.083.000	241.774.000	0,13
Beban Lembur	71.798.000	36.672.000	48,92
Jumlah Beban	2.614.597.426	2.475.946.120	5,30

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.42.022.700 dan Rp.141.915.900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan konsumsi	42.022.700	141.915.900	-237,71
Beban persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	42.022.700	141.915.900	-237,71

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.255.420.262 dan Rp. 2.376.320.529. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan pada beban Barang dan jasa sebesar -4,03 persen disebabkan karena adanya pemotongan anggaran.

Beban
Persediaan Rp
42.022.700

Beban Barang
dan Jasa Rp
2.255.420.262

Rincian Beban Barang dan JasaTA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	37.196.400	75.671.400	-103,44
Beban Honor Output Kegiatan	53.630.000	79.700.000	-48,61
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	100.407.240	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24.155.700	11.403.400	52,79
Beban Barang Operasional Lainnya	318.027.323	211.494.330	33,50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	63.056.000	108.720.000	-72,42
Beban Pengiriman Surat	191.000	354.000	-85,34
Beban Jasa Profesi	36.750.000	43.000.000	-7,01
Beban Keperluan Perkantoran	1.288.232.024	1.304.864.725	-1,29
Beban Jasa Konsultan	15.000.000	0	100
Beban Langganan Air	28.059.800	24.533.100	12,57
Beban Langganan Listrik	254.912.676	237.112.136	6,98
Beban Langganan Telepon	136.209.339	116.434.453	14,52
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	32.625.745	0
Jumlah	2.255.420.262	2.376.320.529	-4,03

Beban
Pemeliharaan
Rp1.224.270.714

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.224.270.714 dan Rp.683.028.231. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	716.862.779	279.109.080	61,07
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	447.427.863	403.919.151	9,72
Beban Pemeliharaan lainnya	59.980.072	0	100
Jumlah Beban	1.224.270.714	683.028.231	44,21

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp426.802.296

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 426.802.296 dan Rp.691.266.833. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas sebesar -61,96 karena adanya Pemangkasan anggaran perjalanan dinas tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. Surat edaran ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Pemotongan anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa alokasi pagu perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	426.802.296	691.266.833	-61,96
Jumlah Beban	426.802.296	691.266.833	-61,96

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp538.385.550

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.538.385.550 dan Rp. 767.175.758 .Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	272.914.424	499.186.319	-82,91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	261.439.990	261.439.990	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.840.412	3.840.412	0
Jumlah Penyusutan	538.194.826	764.466.721	-42,04
Beban Amortisasi Hak Cipta	190.724	190.724	0
Beban Amortisasi Paten	0	41.250	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain		2.477.063	0
Jumlah Amortisasi	190.724	2.709.037	0
Jumlah Beban	538.385.550	767.175.758	-42,50

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp
546.675

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp546.675 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	546.675	0	100
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	546.675	0	100

Kegiatan Non
Operasional
Rp.0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Penjualan Alat Kantor	0	0	0
Selisih Kurs	0	0	0
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Pos Luar
Biasa Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

Ekuitas Awal
Rp
10.166.001.010

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.166.001.010 dan. Rp10.844.163.400

Defisit LO
Rp.
6.918.341.580

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.6.918.341.580 dan Rp.7.058.094.595. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.4. Transaksi Antar Entitas

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp.0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp87.508.368.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar
Entitas Rp
6.602.986.698

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.6.602.986.698 dan Rp.6.292.423.837. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	77.186.700
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.680.173.398
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	6.602.986.698

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode 31 Desember 2024 ,DEL sebesar Rp.77.186.700 sedangkanDKEL sebesar Rp. 6.680.173.398

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

TransferMasuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.850.646.128 dan Rp.10.166.001.010

Ekuitas Akhir Rp.
9.850.646.128

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Terdapat temuan terkait pembayaran tunjangan umum Petugas belajar a.n Darin Firda sebesar Rp. 185.000 dan sudah di rekam pada Aplikasi Sakti.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.05/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang penerbitan rekening giro, maka UPT Balitklimat TMT Januari 2013 hanya mengeluarkan satu rekening yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Treasure Single Account (TSA) atas nama Bendahara Pengeluaran untuk keperluan menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

Tahun anggaran sebelumnya (2013) dana APBN ditampung melalui Bank JABAR, sebagai langkah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku maka mulai 7 Januari 2013 rekening Bank JABAR ditutup dan dialihkan ke BRI. Untuk menampung dana penelitian yang bersumber dari mitra kerja sebelum adanya peraturan Menteri Keuangan No. 58/2013, ditampung melalui rekening BRI No.0012-01-00147130-8 yang ditatausahakan oleh Bendahara Kerjasama

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Keuangan No. 37/PB/2013 tentang sistem penggajian PNS melalui giralisasi (Bank), maka per tanggal 17 September 2013 Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi membuka rekening baru di Bank BNI 46 dengan nomor rekening 196033757. Pertimbangan membuka rekening pada bank tersebut :

1. KPPN Bogor sudah bekerjasama dengan Bank BNI 46, sehingga akan lebih mempermudah dan mempercepat pencairan dana dariBUN.
2. Adanya kemudahan dan fasilitas dari BNI 46 yang lebih baik dari Bank lain.

Untuk memenuhi peraturan yang berlaku maka rekening BRI yang digunakan untuk menampung dana dari mitra telah ditutup sejak tanggal 25 Oktober 2013, dan seluruh saldonya telah dipindahkan ke rekening BNI 46

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi mengalami perubahan nama menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian di tetapkan pada tanggal 27 Maret 2025, terkait hal tersebut semua lampiran laporan keuangan sudah tercetak dengan nama baru.

Pejabat Pengelola Anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Kuasa Pengguna Anggaran	Rima Purnamayani,SP.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	M Nur Imansyah,S.Kom
Kasubbag Tata Usaha	Heri Wibowo, ST,M.Sc
Bendahara Pengeluaran	Sulistyawati A.Md
Bendahara Penerimaan	Dian Andriani A.Md

LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 9:13 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	33,821,000	17,021,000	16,800,000	98.702
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	33,821,000	17,021,000	16,800,000	98.702
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	33,821,000	17,021,000	16,800,000	98.702
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,618,302,426	2,475,946,120	142,356,306	5.75
Beban Persediaan	42,022,700	141,915,900	(99,893,200)	(70.389)
Beban Barang dan Jasa	2,255,420,262	2,376,320,529	(120,900,267)	(5.088)
Beban Pemeliharaan	1,224,270,714	683,028,231	541,242,483	79.242
Beban Perjalanan Dinas	426,802,296	691,266,833	(264,464,537)	(38.258)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 9:13 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

LAPORAN OPERASIONAL				
TINGKAT SATUAN KERJA				
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
(DALAM RUPIAH)				
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	538,385,550	767,175,758	(228,790,208)	(29.822)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	546,675	0	546,675	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,105,750,623	7,135,653,371	(29,902,748)	(0.419)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,071,929,623)	(7,118,632,371)	46,702,748	(0.656)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(3,002,657)	55,357,776	(58,360,433)	(105.424)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	55,357,776	(55,357,776)	(100)
Beban Pelepasan Aset	3,002,657	0	3,002,657	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	156,590,700	5,180,000	151,410,700	2,922.986
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	156,590,700	5,180,000	151,410,700	2,922.986
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	153,588,043	60,537,776	93,050,267	153.706
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,918,341,580)	(7,058,094,595)	139,753,015	(1.98)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,918,341,580)	(7,058,094,595)	139,753,015	(1.98)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.Si
NIP 197606132003122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 9:14 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

EKUITAS AWAL	10,188,001,010	10,844,163,400	(678,162,390)	(6.25)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,918,341,580)	(7,058,094,595)	139,753,015	(1.98)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	87,508,368	(87,508,368)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	87,508,368	(87,508,368)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,602,986,698	6,292,423,837	310,562,861	4.94
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(315,354,882)	(678,162,390)	362,807,508	(53.5)
EKUITAS AKHIR	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.1)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI
NIP 197606132003122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN 648694

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 9:16 AM
Halaman : 1
lap_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26,000,000	77,186,700	51,186,700	296.87	26,000,000	77,558,776	51,558,776	298.3
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	26,000,000	77,186,700	51,186,700	296.87	26,000,000	77,558,776	51,558,776	298.3
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	26,000,000	77,186,700	51,186,700	296.87	26,000,000	77,558,776	51,558,776	298.3
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,245,158,000	6,680,173,398	(564,984,602)	92.20	7,119,615,000	6,369,982,613	(749,632,387)	89.47
1. Belanja Pegawai	2,743,669,000	2,614,597,426	(129,071,574)	95.30	2,486,615,000	2,475,946,120	(10,668,880)	99.57
2. Belanja Barang	4,381,489,000	3,947,975,972	(433,513,028)	90.11	4,633,000,000	3,894,036,493	(738,963,507)	84.05
3. Belanja Modal	120,000,000	117,600,000	(2,400,000)	98.00	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 9:16 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	109,520,000	0	109,520,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(546,675)	0	(546,675)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	108,973,325	0	108,973,325	0.00
Persediaan	965,000	1,505,000	(540,000)	(35.88)
JUMLAH ASET LANCAR	109,938,325	1,505,000	108,433,325	7,204.87
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	18,133,880,752	18,143,458,252	(9,577,500)	(0.05)
Gedung dan Bangunan	10,588,957,500	10,588,957,500	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	152,320,500	152,320,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	348,902,500	348,902,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(19,494,704,259)	(19,083,686,933)	(411,017,326)	2.15
JUMLAH ASET TETAP	9,729,356,993	10,149,951,819	(420,594,826)	(4.14)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	129,675,000	129,675,000	0	0.00
Aset Lain-lain	507,801,673	2,294,747,749	(1,786,946,076)	(77.87)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(626,125,863)	(2,409,878,558)	1,783,752,695	(74.02)
JUMLAH ASET LAINNYA	11,350,810	14,544,191	(3,193,381)	(21.96)
JUMLAH ASET	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.10)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.10)
JUMLAH EKUITAS	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.10)
JUMLAH EKUITAS	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.10)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,850,646,128	10,166,001,010	(315,354,882)	(3.10)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.Si
NIP 197606132003122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 9:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	109,520,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	546,675
0.0	117111	Barang Konsumsi	965,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	18,133,880,752	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,588,957,500	0
0.0	134113	Jaringan	152,320,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	348,902,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,499,117,353
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,958,478,767
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	37,108,139
0.0	162121	Hak Cipta	13,350,000	0
0.0	162141	Paten	825,000	0
0.0	162151	Software	115,500,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	507,801,673	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	507,801,673
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	1,999,190
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	825,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	115,500,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,680,173,398
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	77,186,700	0
0.0	391111	Ekuitas	0	10,166,001,010
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,821,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	29,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	154,140,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,450,700
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,738,379,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	27,336	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	148,988,560	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	46,717,662	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	22,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	59,230,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,810,213	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	111,454,380	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	226,140,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	53,829,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	90,487,300	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,427	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (648694) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/25 2:46 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 9:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,267,040	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	853,408	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13,350,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,345,200	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	15,943,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	71,798,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,288,232,024	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	191,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	63,056,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	318,027,323	0
3.0	521211	Beban Bahan	37,196,400	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	53,630,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	24,155,700	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	254,912,676	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	136,209,339	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	28,059,800	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	36,750,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	716,862,779	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	447,427,863	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	59,980,072	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	426,802,296	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	272,914,424	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	261,439,990	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,840,412	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	190,724	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,022,700	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	546,675	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	3,002,657	0
JUMLAH			37,157,962,905	37,157,962,905

Keterangan :

FINAL

Bogor, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

RIMA PURNAMAYANI, S.P., M.SI

NIP 197606132003122001